

BAB IV

KESIMPULAN

Dari analisis yang disampaikan pada Bab III mengenai analisis minimnya pengiriman tenaga kerja asing asal Indonesia ke Jepang dengan visa *Specified Skilled Worker* dijelaskan bahwa semenjak *Memorandum of Cooperation (MoC)* ditandatangani Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang memadai untuk mengirimkan Pekerja Migran Indonesia dengan skema perseorangan. Selama ini pemerintah cenderung fokus pada pengiriman PMI dengan model *Government to Government (G to G)* dan juga melalui pihak ketiga yang diberi nama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan dalam skema perseorangan layaknya visa SSW/Tokutei Ginou tampaknya pemerintah Indonesia minim melakukan pengenalan kepada masyarakat akan program ini. Selain itu, IPKOL sebagai sarana bertemunya pencari kerja dengan penerima kerja juga mengalami kegagalan. Pemerintah tidak memiliki eksistensi yang kuat dalam program SSW.

Dapat disampaikan, minimnya pekerja *Specified Skilled Worker (SSW)/Tokutei Ginou* di Jepang dari sisi kebijakan public yakni disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah akan program SSW. Pemerintah kurang mengambil peran sehingga *Specified Skilled Worker (SSW)/Tokutei Ginou* tidak begitu banyak dikenal oleh masyarakat. Selain itu, aparatur birokrasi yang secara langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat juga minim pengetahuan.

Selain itu, minimnya pekerja SSW ini juga disebabkan karena pemerintah Indonesia tidak proaktif memberikan pemahaman bahwa ada skema yang lebih menguntungkan yakni melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Justru dengan skema PMI perseorangan, banyak pihak yang bisa mengatasnamakan Lembaga yang dapat mengirimkan pekerja ke Jepang, dan malah akan semakin mahal biayanya

Diluar itu, pengiriman pekerja *Specified Skilled Worker (SSW)/Tokutei Ginou* ke Jepang juga terhambat oleh fenomena Covid-19 yang mewabah diseluruh dunia. Jepang yang memproteksi negaranya dengan sangat ketat berimbas terhadap

mobilisasi pekerja Specified Skilled Worker (SSW)/Tokutei Ginou. Sedangkan di Indonesia, angka kasus wabah ini terus meningkat tajam.

SARAN

Pemerintah Indonesia bisa lebih proaktif lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar program SSW dapat lebih dikenal luas. Hal ini perlu dilakukan karena sejatinya banyak WNI yang ingin ke Jepang baik untuk melanjutkan studi maupun berkarir, tetapi pengetahuan mereka terbatas. Masih belum terlambat untuk melakukan sosialisasi yang lebih massif kepada masyarakat. BP2MI bisa berkoordinasi dengan Lembaga LTSA yang ada di Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan seminar di Desa/kelurahan dengan menggandeng LPK atau instansi yang berpengalaman dibidang ke-Jepang-an.

Selain itu, pemerintah Indonesia melalui BP2MI bisa memasifkan media sosial dan ruang digital seperti Youtube untuk bisa menarik atensi publik melalui berbagai event dan kegiatan. Misalnya dengan mengundang influencer atau alumni Jepang yang sudah Kembali ke Indonesia. Masyarakat harus diedukasi melalui sosialisasi yang kekinian, agar maksud dari sebuah pesan dapat ditangkap dengan lebih efektif.

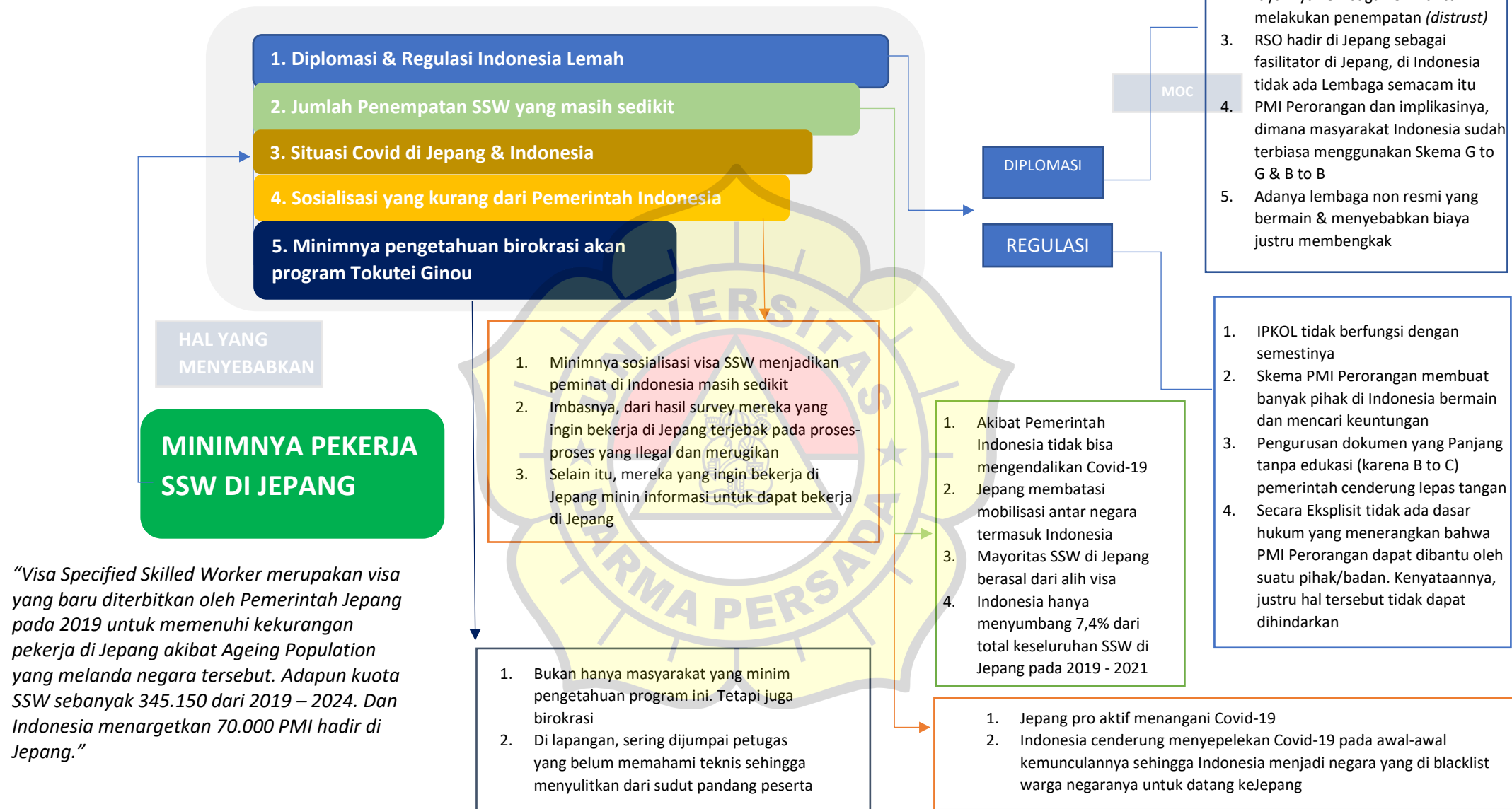
Selain pada aspek sosialisasi, Pemerintah harus melakukan pembenahan didalam institusi, khususnya yang berada di Lembaga tingkat Kabupaten/Kota. Karena mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan menjadi aparat yang harusnya lebih mengetahui persoalan SSW sehingga tidak ada pertanyaan atau pernyataan diluar konteks perundang-undangan yang berlaku. Reformasi birokrasi penting, agar publik merasa terlayani tanpa perlu rasa takut untuk datang dan berkonsultasi ke Lembaga negara.

Saran kepada pembaca penelitian ini agar mencari komparasi dan juga perspektif selain yang penulis teliti agar terjadi keseimbangan dan kesinambungan. Tentu penelitian ini pastinya mengandung subjektifitas dan pra kondisi narasi disamping objektifitas yang menjadi keharusan dalam penelitian. Oleh karenanya, penting untuk tidak membaca sampai disini saja melihat program SSW kedepannya

akan terus berkembang. Tentu penulis sangat membutuhkan masukan dan kritik untuk membangun penelitian yang lebih holistic dan menyeluruh.



BAGAN PRESENTASI



“Visa Specified Skilled Worker merupakan visa yang baru diterbitkan oleh Pemerintah Jepang pada 2019 untuk memenuhi kekurangan pekerja di Jepang akibat Ageing Population yang melanda negara tersebut. Adapun kuota SSW sebanyak 345.150 dari 2019 – 2024. Dan Indonesia menargetkan 70.000 PMI hadir di Jepang.”

Kesimpulan: Minimnya PMI asal Indonesia untuk Visa SSW diakibatkan oleh

- 1) Indonesia belum memiliki kesiapan regulasi yang memadai & belum bisa memberikan posisi tawar (diplomasi) yang kuat
- 2) Pada akhirnya kondisi ini menyebabkan jumlah penempatan yang masih sedikit yang diperparah oleh situasi Covid 19 yang mengglobal
- 3) Kemudian, pemerintah kurang melakukan sosialisasi disamping para aparatur birokrasi juga masih minim pemahaman mengenai program baru ini